



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35  
TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API  
KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lintas pelayanan kereta api kelas ekonomi, pola operasi serta pola pelayanan yang berdampak pada perubahan tarif angkutan dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik, perlu mengatur kembali penyusunan Peraturan Menteri mengenai tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik (*Public Service Obligation*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 197 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1848), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), terdiri atas :
    - a. perkeretaapian antar kota; dan
    - b. perkeretaapian perkotaan.
  - (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Menambahkan lintas dan tarif orang dengan kereta api kelas ekonomi perkotaan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Ketentuan pada Lampiran II diubah, yaitu mencabut Kereta api Lokal Rangkas/Ekonomi lokal lintas Angke – Rangkasbitung dan Kereta api Rangkas Jaya lintas Rangkasbitung – Tanahabang/Angke yang berubah menjadi KR dan mencabut Kereta api Merak Jaya /Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak, Kereta api Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta, Kereta api Jatiluhur dan Kereta api Walahar Ekspres/ Ekonomi Lokal yang berubah lintas pelayanan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 541

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN**

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)	Ket.
1	2	3	4	5
<b>KA JARAK DEKAT/LOKAL</b>				
1	Merak Jaya /Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak	Merak - Rangkasbitung	3.000	Perubahan pada Asal-Tujuan serta besaran tarif
2	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta	Purwakarta - Tanjungpriok	6.000	Perubahan pada Asal-Tujuan
3	Jatiluhur	Cikampek - Tanjungpriok	5.000	Perubahan pada Asal-Tujuan
4	Walahaar Ekspres/Ekon Lokal	Tanjungpriok - Purwakarta	6.000	Perubahan pada Asal-Tujuan
5	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka - Purwakarta	7.000	Lintas Pelayanan Baru
6	Bandung Raya Ekonomi	Cibatu - Padalarang	7.000	Lintas Pelayanan Baru

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ KERETA API</b>	<b>NAMA</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
1	2		3	4
<b>KA JARAK DEKAT/LOKAL</b>				
1	EkonomiLokal/Cibatuan		Purwakarta-Cibatu	<b>8.000</b>
2	Bandung Raya Ekonomi		Kiaracondong-Cicalengka	<b>4.000</b>
3	Bandung Raya Ekonomi		Bandung-Padalarang	<b>4.000</b>
4	Bandung Raya Ekonomi		Bandung-Cicalengka	<b>4.000</b>
5	Bandung Raya Ekonomi		Cicalengka-Padalarang	<b>5.000</b>
6	Penataran		Surabayakota-Malang-Blitar	<b>15.000</b>
7	Dhoho		Surabayakota-Kertosono-Blitar	<b>15.000</b>
8	Penataran		Blitar-Malang-Surabayakota	<b>15.000</b>
9	Tumapel		Malang-Surabayakota	<b>10.000</b>
10	EkonomiLokal		Kertosono-Surabayakota	<b>10.000</b>
11	EkonomiLokal		Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi-Bojonegoro	<b>12.000</b>
12	EkonomiLokal		Sidoarjo-SurabayaPs.Turi	<b>6.000</b>
13	EkonomiLokal		Surabaya Ps.Turi-Bojonegoro	<b>6.000</b>
14	Pandanwangi		Jember-Banyuwangi	<b>8.000</b>
15	Kalijaga		Purwosari-Semarangponcol	<b>10.000</b>
16	Sibinuang		Pariaman-Padang	<b>5.000</b>

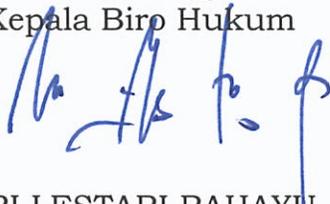
<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ KERETA API</b>	<b>NAMA</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
1	2		3	4
<b>KRD</b>				
17	KRD		Sidotopo/Surabaya-Porong	<b>5.000</b>
18	KRD		Surabaya-Lamongan	<b>5.000</b>
19	Prameks		Yogyakarta/Lempuyangan-Solobalapan/Solojebres	<b>8.000</b>
20	Prameks		Lempuyangan/ Yogyakarta-Kutoarjo/Prembun	<b>8.000</b>
21	Prameks		Prembun/Kutoarjo-Solobalapan/Solojebres	<b>15.000</b>
22	Seminung		Kotabumi-TanjungKarang	<b>10.000</b>
23	Way Umpu		Tanjung Karang-Kotabumi	<b>10.000</b>
24	KedungSepur		Ngrombo-Semarang Poncol	<b>10.000</b>
25	Sri Lelawangsa		Medan-Binjai	<b>5.000</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001